



APBD DKI 2015 Kementerian Dalam Negeri Menolak Mengoreksi

Pembangunan DKI Akan Terganggu Oleh Molornya Pengesahan Anggaran

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menolak mengoreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015. Kementerian beralasan anggaran yang diajukan itu belum lengkap. "Belum lengkap apa yang akan dievaluasinya," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Doddy Riyatmadji, saat dihubungi pada Sabtu lalu.

Doddy mengatakan ketidaklengkapannya berupa penggunaan anggaran secara keseluruhan, termasuk kegiatan sampai satuan tingkat tiga. Namun dia enggan menyebutkan detailnya. Kementerian, menurut Doddy, telah mengembalikan APBD DKI 2015 ke Pemerintah Provinsi. Dia berharap DKI bisa melengkapinya hari ini. Sebab, jika semakin lama, dampaknya akan berpengaruh terhadap rencana pembangunan DKI. "Pasti akan lama juga," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah DKI dan DPRD telah menyepakati anggaran senilai Rp 73 triliun. Jumlah tersebut naik hanya 0,24 persen dibanding pada APBD tahun lalu, yang sebesar Rp 72,9 triliun. Anggaran tersebut harus diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Menurut Doddy, anggaran ditetapkan sebagai peraturan daerah setelah dikoreksi pihak Kementerian. APBD kemudian diserahkan lagi ke pemerintah. Jika koreksinya perlu melibatkan legislatif, anggaran yang telah dikoreksi tersebut dibawa ke rapat paripurna Dewan. Misalnya, koreksi terhadap satu atau lebih kegiatan. "Intinya harus persetujuan bersama."

Jika sudah selesai, hasil pembahasan dan perbaikan dikembalikan ke Kementerian untuk

dicek kembali. Apabila hasil koreksi Kementerian dipatuhi, ujar Doddy, APBD bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan belum tahu hasil koreksi dari Kementerian seperti apa. "Kami tunggu saja koreksinya. Mungkin Senin sudah," ucapnya, Sabtu lalu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengakui APBD 2015 telah dikembalikan oleh Kementerian karena tidak lengkap. "Iya dikembalikan. Ada lampiran yang kurang." Sayangnya, Heru tak menyebutkan detail lampiran yang kurang

"Kalau APBD 2015 masih ditolak untuk dikoreksi. Ini artinya APBD belum boleh direalisasi karena siapa tahu proyek tersebut disuruh dihapus oleh Kemendagri."

itu apa.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Maman Firmansyah, mengatakan penolakan Kementerian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah DKI bermasalah. "Yang *lemot* berarti sebelah," katanya.

Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengatakan penolakan Kemendagri mengoreksi APBD DKI bisa mengganggu pembangunan. Contohnya pada musim hujan seperti sekarang, banyak jalan rusak yang perlu segera diperbaiki tapi karena APBD belum ditetapkan tidak bisa dikerjakan.

"Kalau APBD 2015 masih

ditolak untuk dikoreksi. Ini artinya APBD belum boleh direalisasi karena siapa tahu proyek tersebut disuruh dihapus oleh Kemendagri," kata Uchok. Selain itu, tunjangan kinerja daerah yang selangit juga belum bisa diterapkan. Sebab, bisa saja Kementerian menolaknya.

● ERWAN HERMAWAN